



JAGA CITRA PARIWISATA DIY

Standardisasi Harga Dirembuk PKL Kuliner Malioboro

YOGYA (KR) - Para pedagang kaki lima (PKL) kuliner di Kawasan Malioboro bakal berembuk standardisasi harga minimal dan maksimal makanan. Hal tersebut dilakukan guna menjaga citra pariwisata DIY sekaligus mengantisipasi munculnya fenomena harga PKL yang di luar batas kewajaran bagi pengunjung ataupun wisatawan di Kawasan Malioboro.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro Sukidi mengatakan, standardisasi harga makanan PKL di Malioboro tersebut merupakan bagian dari wacana yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan seluruh anggota paguyuban PKL kuliner basah di Malioboro. Standardisasi harga minimal dan maksimal tersebut dimungkinkan selama ada kesepakatan dengan seluruh anggota paguyuban PKL di kawasan Malioboro.

"Kita sudah mulai melakukan evaluasi dan menying-

gung rencana untuk membuat standardisasi harga bagi PKL kuliner basah di Kawasan Malioboro. Rencana standardisasi harga ini akan ditindaklanjuti pasca libur Lebaran ini, tidak hanya bagi pedagang lesehan namun juga diperuntukkan bagi PKL kuliner lainnya," papar Sukidi kepada KR, Selasa (4/7).

Dijelaskan, mekanisme formulasi standardisasi ini akan dibahas dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban. Pihaknya sendiri tengah berupaya merealisasikan rencana

standardisasi harga tersebut demi kepentingan saat ini dan masa depan. "Kami tidak ingin muncul lagi keluhan soal harga lesehan Malioboro yang *nu-
thuk* baik di media sosial maupun media massa. Kami sendiri siap berbenah dan tidak keberatan untuk menggodok standardisasi harga demi citra pariwisata kota Yogyakarta tercinta," ungkap Sukidi.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Duwono X meminta kepada para PKL khususnya di Kawasan Malioboro untuk tidak menaik-

kan harga di luar batas kewajaran. Karena selain tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi DIY sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, apabila masih ada PKL yang menaikkan harga secara sembarangan, Gubernur DIY meminta agar aparat segera menertibkan.

"Saya minta UPT Malioboro bisa lebih proaktif dalam melakukan penertiban dan tidak sekadar menunggu aduan dari masyarakat. Tindakan itu lakukan untuk mengantisipasi adanya pedagang yang memasang harga secara tidak wajar," terangnya.

Sultan mengungkapkan, menjelang dioperasikannya Bandara Internasional Baru di Kulonprogo semua stakeholders terkait, termasuk penyedia jasa pariwisata di DIY harus siap menerapkan layanan sesuai standar. Hal itu dibutuhkan sebagai bentuk keseriusan dari peningkatan kualitas layanan. Konsekuensi dari itu, adanya kenaikan harga di luar kewajaran sudah selayaknya ditinggalkan karena akan menoreng citra pariwisata DIY.

"Wisatawan domestik maupun mancanegara pasti menginginkan layanan terbaik, salah satunya dengan adanya standardisasi. Karena standardisasi saat ini menjadi suatu keharusan yang harus ditaati. Jadi, tidak dengan model menaikkan harga seperti itu," tegas Sultan. (Ira/Ria)-o

Yogyakarta,

Instansi
Malioboro

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005